

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di Indonesia ini senantiasa tidak lepas dari sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan nasional. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sumber pendapatan negara menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri merupakan penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk melaksanakan sistem perpajakan masyarakat Indonesia harus mengerti pajak agar tidak terjadi penyimpangan maka pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Seperti yang kita ketahui pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dasar hukum pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari berbagai sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berdasarkan jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu pajak yang memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sektor unggulan dalam kontribusinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak

Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga membantu daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memiliki peranan yang sangat besar dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota Jambi. Sejalan dengan itu maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak daerah Provinsi Jambi dengan melaksanakan salah satu potensi terutama pada potensi daerahnya sendiri untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak yang memerlukan dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya kedalam bentuk laporan yang berjudul **“MEKANISME PELAPORAN DAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR GERAJ SAMSAT KOTA JAMBI YANG BERLOKASI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BAKEUDA) PROVINSI JAMBI ”**.

1.2 Masalah Pokok Pelaporan

Masalah Pokok Laporan Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan laporan ini ialah :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaporan Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Gerai Samsat Kota Jambi Yang Berlokasi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Mekanisme Penerimaan Kendaraan Bermotor (PKB) Kantor Gerai Samsat Kota Jambi Yang Berlokasi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?
3. Apa saja kendala yang terdapat di dalam Penerimaan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Gerai Samsat Kota Jambi Yang Berlokasi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Gerai Samsat Kota Jambi Yang Berlokasi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?
2. Untuk mengetahui Mekanisme Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Gerai Samsat Kota Jambi Yang Berlokasi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat pada saat Pelaporan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Gerai Samsat Kota Jambi Yang Berlokasi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan laporan ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang yang diteliti dan mengkombinasikan pengetahuan yang selama ini telah diperoleh dari perkuliahan dan informasi-informasi yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi khususnya di bidang Pajak Daerah.

2. Bagi Kalangan Aktivis

Penulisan laporan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pembaca yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sejenis.

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Penulisan laporan ini dapat menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.4. Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan laporan ini adalah :

1.4.1 Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan Kepala Bidang Pajak dan Kepala Sub bidang Pengawasan Pajak serta karyawan/karyawati di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

Penulis melakukan tanya jawab pada saat melakukan Praktek Kerja Lapangan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

1.4.2 Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang didapat dari tinjauan langsung dengan melihat dan mempelajari setiap kejadian yang ada dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapata Daerah Provinsi Jambi.

1.4.3. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data berkenaan memahami berbagai macam bacaan. Untuk memperoleh data dengan menggunakan buku-buku, penulis meminjam buku-buku dari perpustakaan.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021 s/d 8 April 2021. Lokasi pelaksanaan Magang bertempat di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman No.117, Thehok, Jambi Selatan, Kota Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan magang ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan secara garis besar masing-masing Bab mencakup hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian sehingga diharapkan dapat menggambarkan laporan secara garis besar.

BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori atau konsep yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan di bahas pada bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang meliputi sejarah singkat dan perkembangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, visi dan misi, Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, bidang kerja, dan Mekanisme Penerimaan dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Badan Pengeloaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan laporan ini yang berisikan kesimpulan dan saran, penulis membahas tentang kesimpulan dan hasil pengamatan dan saran-saran yang akan berguna bagi para pembaca dan penulis.